



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANYUMAS

[BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA]

Jl. Dr. Soeparno No 32 Purwokerto Telp./Fax : 0281 636079 website : bkpsdm.banyumaskab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia- Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas Tahun 2023, Renja ini sebagai penjabaran dari aktivitas kegiatan selama satu tahun dan merupakan amanat dari Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang menyebutkan bahwa Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas :

1. RPJPD;
2. RPJMD ;
3. Renstra SKPD;
4. RKPD; dan
5. RENJA SKPD

Rencana Kerja Perubahan ini memuat beberapa hal terkait dengan rencana yang akan dilakukan pada tahun 2023 diantaranya adalah

- a. Program dan kegiatan;
- b. Lokasi kegiatan;
- c. Indikator kineija;
- d. Kelompok sasaran;
- e. Pagu indikatif dan prakiraan maju.

Semoga dengan adanya dokumen rencana kerja ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan penyusunan kegiatan pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas, sehingga dapat menghasilkan output dan outcome sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS**

**Ir. DJOKO WIKANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630408 198810 1 002**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan telah di ubah beberapa kali menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana untuk melaksanakan urusan yang dimanakan dalam undang-undang tersebut kedaerah maka melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas tahun 2023 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023. Renja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas tahun 2023 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 48 Tahun 2019. Adapun program dalam Renja Perubahan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas adalah mengacu pada program sesuai dengan penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Banyumas periode tahun 2018 – 2023 maka sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 kepala Perangkat Daerah wajib meyusun Rencana Kerja Tahunan yang merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah mewujudkan Tujuan, Sasaran, melalui Strategi, kebijakan, dengan melaksanakan Program dan Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas yang memedomani pada Renstra Perubahan SKPD 2018-2023 sebagai perencanaan jangka menengah SKPD selama 5 tahun dengan menyelaraskan RPJM Daerah 2018-2023 dan bersifat indikatif.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589);
5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apaatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas, Tahun 2009 Nomor 3 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 88 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas.

1.3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud penyusunan rencana kerja perubahan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas adalah untuk menyiapkan rencana kerja tahunan Tahun Anggaran 2023 yang merupakan penjabaran dari Renstra Perubahan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023.
- b. Tujuan penyusunan Renja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas adalah untuk memberikan arah kebijakan perencanaan pembangunan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia pada tahun anggaran 2023 dan sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia pada tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Bab III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.2 Program dan Kegiatan

Bab V : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas mencoba mengevaluasi dengan mengkaji dan menelaah hasil capaian kinerja antara realisasi pelaksanaan, rencana kerja dengan capaian Renstra SKPD yang sudah di tetapkan, serta prakiraan capaian pelaksanaan rencana kerja SKPD tahun 2022 dengan tabel sebagai berikut :

[illegible]

[INDSASARAN]	Persentase ASN yang mendapatkan penilaian kinerja kategori BAIK	%	100			100		100		100		100		100		100		100		100		100		100				
[PROGRAM]PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							3.909.044.100		3.909.044.100		3.909.044.100		44.740.000		531.504.608		725.550.333		1.670.634.836		2.972.429.777		76.04					
[INDPROGRAM]	Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	%	95		95		95		95		95		95		95		95		95		100		95		100		Jumlah Pejabat Struktural : 942, Pejabat Struktural Eselon IV yang masih pendidikan SLTA : 34, Pejabat Struktural Eselon III yang masih pendidikan D3 : 1 orang. Total 95%	
[KEGIATAN]Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN							1.085.000.000		1.085.000.000		1.085.000.000		540.000		95.965.050		221.503.911		353.499.534		671.508.495		61.89					
[INDKEGIATAN]	Jumlah ASN yang mengisi formasi jabatan sesuai penetapan formasi menpan RB	Orang	3320		2320		500		500		0		0		0		1991		1991		398.2		2320		69.88	Formasi masih menunggu Surat Keputusan MenPAN RB	Jumlah formasi PPPK Guru 1967 Formasi Jumlah formasi PPPK Kesehatan 24 Formasi	

[SUBKEGIATAN] Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																													
[INDSUBKEGIAT AN]	jumlah usulan jabatan yang disusun	Usul an	440 0		14 00	15 00		15 00	15 00		N/ A		N/ A		0		N/ A		N/ A			0		140 0		N/ A		Sub kegiatan tidak dilaksan akan karena keterbat asan anggara n	Sub kegiatan tidak dilaksan akan karena keterbata san anggara n
[SUBKEGIATAN] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK							900.000 .000		900.000 .000		900.000 .000		540.00 0		53.090. 290		191.660 .911		277.631 .074		522.922 .275		58 .1						
[INDSUBKEGIAT AN]	Jumlah formasi yang tersedia	For masi	332 0		23 20	50 0		50 0	50 0		0		0		0		19 91		19 91			39 8. 2		232 0		69. 88		Formasi belum tersedia menung gu Surat Keputus an MenPAN	Jumlah formasi PPPK Guru 1967 Formasi Jumlah formasi PPPK Tenaga Kesehat an 24 Formasi
[SUBKEGIATAN] Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian							75.000. 000		75.000. 000		75.000. 000				24.182. 360		2.500.0 00		17.856. 460		44.538. 820		59 .3 9						
[INDSUBKEGIAT AN]	Jumlah SK pensiun yang diterbitkan	SK	232 0		82 0	75 0		75 0	75 0		0		42 9		15 6		26 4		84 9			11 3. 2		166 9		71. 94		Jumlah SK Pensiun yang diterbitka n 849 sk	
[SUBKEGIATAN] Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian							80.000. 000		80.000. 000		80.000. 000				5.384.4 00		12.798. 000		58.012. 000		76.194. 400		95 .2 4						

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah aplikasi kepegawaian yang tersedia	aplikasi	1		1		1		1		1		0		0		0		1		100		2		200			TW1 : 1 TW2: 0 TW3: 0 TW4: 0 (Pengelolaan aplikasi SIMPEG)
[SUBKEGIATAN] Pengelolaan Data Kepegawaian							30.000.000		30.000.000		30.000.000			13.308.000		14.545.000				27.853.000		92.84						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah arsip kepegawaian yang dikelola	Arsip	11000		11000		11000		11000		11000		11000		11000		11000		11000		100		11000		100			TW1 : 11.000 TW2: 11.000 TW3: 11.000 TW4: 11.000 Pengelolaan arsip kepegawaian 11.000 arsip
[KEGIATAN]Mutasi dan Promosi ASN							1.372.237.000		1.372.237.000		1.372.237.000		38.700.000		368.500.042		227.647.395		592.555.542		1.227.402.979		89.45					
[INDKEGIATAN]	Jumlah ASN yang dimutasi dan dipromosikan	Orang	500		500		500		500		125		125		125		125		500		100		1000		200			
[SUBKEGIATAN] Pengelolaan Mutasi ASN							58.835.000		58.835.000		58.835.000			7.515.350		3.375.000		41.862.648		52.752.998		89.66						

[INDSUBKEGIAT AN]	Jumlah SK Mutasi Pegawai yang diterbitkan	SK	600		200	200	200		200		11		23		258		333		625		312.5		825		137.5		Jumlah SK Mutasi sampai dengan triwulan IV = 625 SK Jumlah SK Mutasi TW 1 = 11 Jumlah SK Mutasi TW 2 = 23 Jumlah SK Mutasi TW 3 = 258 Jumlah SK Mutasi TW 4 = 333
[SUBKEGIATAN] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN							200.000.000		200.000.000		200.000.000		32.500.000		38.418.000		75.712.790		53.286.140		199.916.930		99.96				
[INDSUBKEGIAT AN]	Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang diterbitkan	SK	5400		1800	1800	1800		1800		0		843		0		648		1491		82.83		3291		60.94		TW1: 0 TW2: 843 SK TW3: 648 SK TW4: 0
[SUBKEGIATAN] Pengelolaan Promosi ASN							1.113.402.000		1.113.402.000		1.113.402.000		6.200.000		322.566.692		148.559.605		497.406.754		974.733.051		87.55				
[INDSUBKEGIAT AN]	Jumlah kekosongan JPTP yang terisi	jabat an	14		3	7	7		7		0		5		0		2		7		100		10		71.43		TW1: 0 TW2: Jumlah pengisia n JPTP = 5 jabatan TW3: 0 TW 4 : Jumlah pengisia n JPTP = 2 jabatan

[KEGIATAN]Pengembangan Kompetensi ASN							952.895.100		952.895.100		952.895.100		4.000.000		53.834.516		148.031.947		504.381.040		710.247.503		74.54						
[INDKEGIATAN]	Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	Orang	1200		400		400		400		400		100		100		100		198		498		124.5		898		74.83		Jumlah PNS yang dikirim diklat, ijin belajar dan tugas belajar, Ujian Dinas, UKPPI 498 orang
[SUBKEGIATAN] Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN							839.178.100		839.178.100		839.178.100				45.859.664		140.453.338		442.484.713		628.797.715		74.93						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah PNS yang dikirim mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Tugas Belajar, Ijin Belajar, Ijin Penggunaan Gelar)	Orang	900		200		300		300		300		30		142		160		166		498		166		698		77.56		TW1: 30 Jumlah PNS yang dikirim mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Tugas Belajar, Ijin Belajar, Ijin Penggunaan Gelar) TW2: 142 TW3: 160 TW4: 166
[SUBKEGIATAN] Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional							113.717.000		113.717.000		113.717.000		4.000.000		7.974.852		7.578.609		61.896.327		81.449.788		71.62						

[INDSUBKEGIAT AN]	Jumlah SK Pejabat Fungsional yang terbit	SK	105 0		35 0	35 0		35 0		35 0		0		90		13 0		12 2		34 2		97 .7 1		692		65. 9			TW1: 0 TW2: Jumlah SK Fungsional yang diterbitka n = 90 SK TW3: 130 TW4: 79
[KEGIATAN]Penil aian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							498.912 .000		498.912 .000		498.912 .000		1.500.0 00		13.205. 000		128.367 .080		220.198 .720		363.270 .800		72 .8 1						
[INDKEGIATAN]	Jumlah ASN yang nilai SKP nya baik	Oran g	110 00		11 00 0	11 00 0		11 00 0		11 00 0		11 00 0		11 00 0		11 00 0		11 00 0		11 00 0		10 0		110 00		10 0		Jumlah PNS yang nilai SKP nya baik 11.000 PNS	
[SUBKEGIATAN] Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							65.000. 000		65.000. 000		65.000. 000		1.500.0 00		9.575.5 00		11.068. 000		26.639. 700		48.783. 200		75 .0 5						
[INDSUBKEGIAT AN]	Jumlah ASN yang mengirimk an evaluasi kinerja	Oran g	300 00		10 00 0	10 00 0		10 00 0		10 00 0		25 00		25 00		25 00		25 00		10 00 0		10 0		200 00		66. 67		TW1: Jumlah ASN yang mengirim kan evaluasi kinerja = 2.500 orang TW2: 2.500 TW3: 2.500 TW 4 : 2.500	
[SUBKEGIATAN] Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							25.000. 000		25.000. 000		25.000. 000						8.106.0 00		11.466. 600		19.572. 600		78 .2 9						

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah dokumen kegiatan evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang disusun	Dokumen	2		1	1		1	1		1		1		1		1		1		100		1	50			Dokumen evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang disusun = 1 dokumen
[SUBKEGIATAN] Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai							32.512.000		32.512.000		32.512.000					16.813.000		10.700.347		27.513.347		84.63					
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah pegawai yang menerima penghargaan	Orang	450		150	150		150		150		0		85		0		68		153		102		303	67.33		Jumlah pegawai yang menerima penghargaan Triwulan II= 85 Jumlah pegawai yang menerima penghargaan Triwulan III = 0 Jumlah pegawai yang menerima penghargaan Triwulan IV = 68
[SUBKEGIATAN] Pembinaan Disiplin ASN							270.000.000		270.000.000		270.000.000				2.117.500		35.913.580		152.259.573		190.290.653		70.48				

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah kegiatan pembinaan disiplin ASN yang dilaksanakan	Keg	30		10		10		10		2		2		2		4		10		100		20		66.67		Kegiatan pembinaan disiplin ASN yang dilaksanakan sampai triwulan III = 6 kegiatan Kegiatan pembinaan disiplin ASN yang dilaksanakan sampai triwulan IV = 10 kegiatan
[SUBKEGIATAN] Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN							37.000.000		37.000.000		37.000.000			1.512.000		16.950.000		1.154.500		19.616.500		53.02					
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah SK Pelanggaran Disiplin ASN yang diterbitkan	SK	30		4		10		10		3		2		1		0		6		140		10		166.67		Jumlah SK Pelanggaran Disiplin ASN yang terbit sampai triwulan II = 6 SK Triwulan IV tidak ada SK Pelanggaran disiplin yang diterbitkan
[SUBKEGIATAN] Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai							69.400.000		69.400.000		69.400.000					39.516.500		17.978.000		57.494.500		82.85					

[illegible]

[INDPROGRAM]	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100		100	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100				Pembayaran gaji ASN dan Honor Pengelol a Keuangan sudah dilaksanakan selama 12 bulan dan tercapai 100%.
[INDPROGRAM]	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100		100	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100				Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah telah dilaksanakan selama 6 bulan tercapai 100 % Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah telah dilaksanakan selama 12 bulan tercapai 100 %

[illegible]

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	5		0	0		0		0		N/A		N/A		0		N/A		N/A										Sub kegiatan tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							84.334.000		84.334.000		84.334.000			3.980.000		36.252.330		31.314.260		71.546.590		84.84								
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1		1	1		1		1		0		1		0		0		1		100		2		200				Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun = 1 dokumen
[KEGIATAN]X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							85.526.827.619		85.526.827.619		85.526.827.619		4.587.088.528		20.431.877.921		33.935.825.383		26.104.127.380		85.058.919.212		99.45							
[INDKEGIATAN]	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	3		3	3		3		3		3		3		3		3		3		100		3		100				Jumlah administrasi keuangan yang tersedia 3 jenis
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							85.405.417.619		85.405.417.619		85.405.417.619		4.587.088.528		20.402.237.921		33.896.305.383		26.056.227.380		84.941.859.212		99.46							

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan ya	Orang	1299		433	433		433		433		433		433		433		433		433		100		433		33.33			TW1: Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan nya = 433 TW2: 433 TW3: 433 TW4: 433
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							121.410.000		121.410.000		121.410.000				29.640.000		39.520.000		47.900.000		117.060.000		96.42						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	8		8	8		8		8		8		8		8		8		8		100		8		100			TW1: Jumlah pengelola keuangan SKPD = 8 orang TW2: 8 TW3: 8 TW4: 8
[KEGIATAN]X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah							587.328.600		587.328.600		587.328.600				96.043.620		130.312.798		274.403.600		500.760.018		85.26						
[INDKEGIATAN]	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6		6	6		6		6		6		6		6		6		6		100		6		100			Jumlah administrasi umum yang dikelola = 6 jenis
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							36.437.100		36.437.100		36.437.100						9.771.000		22.407.000		32.178.000		88.31						

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	5		5		5		5		5		5		5		5		5		100		5		100		Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor = 5 jenis
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							73.493.500		73.493.500		73.493.500			17.595.000		1.770.000		23.345.000		42.710.000		100		58.11			
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	5		5		5		5		5		5		5		5		5		100		5		100		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia = 5 jenis
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							35.948.500		35.948.500		35.948.500			1.925.000		7.518.000		24.288.500		33.731.500		100		93.83			
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	5		5		5		5		5		5		5		5		5		100		5		100		Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia = 5 jenis
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor							204.641.000		204.641.000		204.641.000			39.592.500		47.285.500		90.790.000		177.668.000		100		86.82			
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	36		12		12		12		12		3		3		3		12		100		24		66.67		Jumlah logistik kantor yang tersedia = 3 jenis
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							53.847.000		53.847.000		53.847.000			9.950.000		3.603.000		25.193.000		38.746.000		100		71.96			

[INDSUBKEGIAT AN]	Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	300		100	100		100		100	25		25		25		25		100		100		200		66.67			Jumlah cetakan yang tersedia s.d Triwulan II = 50 cetakan
[INDSUBKEGIAT AN]	Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	291534		91530	83333		83333		83333	20830		23300		23300		15903		83333		100		174863		59.98			Jumlah penggandaan sd triwulan II = 44.130 lembar
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							182.961.500	182.961.500		182.961.500				26.981.120		60.365.298		88.380.100		175.726.518		96.05						
[INDSUBKEGIAT AN]	Jumlah Koordinasi/ Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	72		24	24		24		24	6		6		8		4		24		100		48		66.67			Jumlah rapat koordinasi / konsultasi yang dilaksanakan s.d triwulan II = 12 kegiatan
[KEGIATAN]X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							319.903.500	319.903.500		319.903.500				133.345.000			173.795.000		307.140.000		96.01							
[INDKEGIATAN]	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	3		3	3		3		3	3		3		3		3		3		100		3		100			Jumlah barang milik daerah yang tersedia 3 jenis
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel							21.500.000	21.500.000		21.500.000				21.290.000					21.290.000		99.02							

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Unit	10		0		5		5		5		1		2		2		0		5		100		5		50		Jumlah meubelair kantor yang tersedia = 2 jenis
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							255.991.000		255.991.000		255.991.000				94.785.000				149.375.000		244.160.000		95.38						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	8		2		3		3		3		0		2		1		0		3		100		5		62.5		Pengadaan laptop dan printer
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							42.412.500		42.412.500		42.412.500				17.270.000				24.420.000		41.690.000		98.3						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	4		0		2		2		2		0		2		0		0		2		100		2		50		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang tersedia = 2 jenis Kegiatan dilaksan akan di anggaran perubahan
[KEGIATAN]X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							477.969.870		477.969.870		477.969.870		39.700.000		120.865.707		103.033.985		165.636.730		429.236.422		89.8						

[INDKEGIATAN]	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	3		3		3		3		3		3		3		3		3		100		3		100			Jumlah jasa pelayanan umum yang tersedia = 3 jenis
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							219.073.870		219.073.870		219.073.870			60.194.422		41.755.605		103.958.350		205.908.377			93.99					
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	36		12		12		12		3		3		3		3		12		100		24		66.67			Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air = 3 jenis
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																												
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	Jenis	2		0		2		2		0		2		0		0		2		100		2		100			Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan = 2 jenis
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							258.896.000		258.896.000		258.896.000		39.700.000		60.671.285		61.278.380		61.678.380		223.328.045			86.26				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	10		10		10		10		10		10		10		10		10		100		10		100			Jumlah pegawai Non ASN = 10 orang

[KEGIATAN]X.XX. 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								347.410 .000		347.410 .000		347.410 .000				128.857 .000		35.052. 013		160.380 .700		324.289 .713		93 .3 4						
[INDKEGIATAN]	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		10 0		5		10 0			Pemeliharaan kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, pemeliharaan komputer dan printer, pemeliharaan AC
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								80.350. 000		80.350. 000		80.350. 000				15.827. 000		17.253. 263		36.933. 100		70.013. 363		87 .1 4						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		10 0		15		10 0			Jumlah kendaraan operasional = 15 kendaraan
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel								20.000. 000		20.000. 000		20.000. 000				10.000. 000				10.000. 000		20.000. 000		10 0						

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah mebelair yang dipelihara	Unit	75		0		25		25		25		5		5		5		10		25		100		25		33.33		Jumlah meubelair yang dipelihar a = 5 unit Jumlah meubelair yang dipelihar a s.d triwulan 3 = 15 unit
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							56.250.000		56.250.000		56.250.000				10.956.000		17.798.750		16.135.000		44.889.750		79.8						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	60		10		20		20		20		5		5		5		5		20		100		30		50		Jumlah peralatan kantor dan mesin yang dipelihar a = 5 unit
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							165.810.000		165.810.000		165.810.000				67.078.000				97.312.600		164.390.600		99.14						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	2		2		2		2		2		0		2		0		2		2		100		2		100		Rehabilitasi gedung asrama diklat dan pemeliharaan gedung kantor Kegiatan dilaksan akan di anggara n perubah an

[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								25.000. 000		25.000. 000		25.000. 000				24.996. 000					24.996. 000		99 .9 8						
[INDSUBKEGIAT AN]	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	45		10		15		15		15		3		3		5		4		15		10 0		25		55. 56		Jumlah sarana dan prasaran a penduku ng gedung kantor yang dipelihar a = 3 unit
[INDPROGRAM]																													
[INDPROGRAM]																													
[SASARAN]Menin gkatnya kompetensi ASN																													
[INDSASARAN]	Persentase ASN yang lulus pengemba ngan kompetens i sesuai dengan jabatan nya	%	100		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		100		10 0		
[PROGRAM]PRO GRAM PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA								1.687.5 00.000		1.687.5 00.000		1.687.5 00.000		47.892. 600		98.189. 350		291.335 .371		776.130 .219		1.213.5 47.540		71 .9 1					

[illegible]

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah ASN yang lulus penyelenggaraan Diklat Teknis bagi Jabatan Administrasi	Orang	80		0	40		40		40		N/A		N/A		0		N/A		N/A		0				N/A		Sub Kegiatan tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran	Sub Kegiatan tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran
[KEGIATAN]Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional							1.687.500.000		1.687.500.000		1.687.500.000		47.892.600		98.189.350		291.335.371		776.130.219		1.213.547.540		71.91						
[INDKEGIATAN]	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Manajerial dan Fungsional	Orang	877		100	377		377		377		40		0		160		96		296		78.51		396		45.15		Total CPNS formasi 2019 : 376 Jumlah CPNS yang mengikuti latsar 2021 : 80 Jumlah CPNS yang mengikuti i Latsar 2022 : 296	
[SUBKEGIATAN] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan							1.687.500.000		1.687.500.000		1.687.500.000		47.892.600		98.189.350		291.335.371		776.130.219		1.213.547.540		71.91						

[INDSUBKEGIAT AN]	Jumlah ASN yang lulus penyeleng garaan Diklat Manajerial dan Fungsional	Oran g	877	10 0	37 7		37 7		37 7		40		16 0		0		96		29 6		78 .5 1		396		45. 15		Jumlah ASN yang lulus Latsar s.d Triwulan II = 200 orang Jumlah ASN yang lulus Latsar s.d Trwiulan IV = 96 orang
----------------------	---	-----------	-----	---------	---------	--	---------	--	---------	--	----	--	---------	--	---	--	----	--	---------	--	---------------	--	-----	--	-----------	--	---

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas
dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 88 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Kabupaten
Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Koordinator Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi , terdiri dari :
 - a. Sub Koordinator Pengadaan dan Pemberhentian
 - b. Sub Koordinator Data dan Informasi Kepegawaian
4. Bidang Pengembangan Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
 - a. Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi
 - b. Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan
5. Bidang Mutasi dan Promosi, terdiri dari :
 - a. Sub Koordinator Mutasi
 - b. Sub Koordinator Kepangkatan
 - c. Sub Koordinator Pengembangan Karir dan Promosi
6. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, terdiri dari :
 - a. Sub Koordinator Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan ASN
 - b. Sub Koordinator Disiplin dan Penghargaan ASN
7. Jabatan Fungsional

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Tujuan otonomi daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi secara luas, terlebih pada konteks global, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam konteks Kabupaten Banyumas saat ini dan ke depan, Optimalisasi kinerja birokrasi dan pelayanan publik Kualitas kinerja pemerintah daerah perlu untuk ditingkatkan baik dari sisi mental dan etos kerja birokratnya, manajemen kelembagaan dan infrastruktur penunjangnya. Peningkatan etos kerja birokrat dapat dilakukan melalui penerapan disiplin pegawai dan peningkatan kinerja, manajemen kelembagaan dapat ditingkatkan melalui pembenahan tata laksana organisasi sedangkan penguatan infrastruktur pemerintahan dan pelayanan dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi informasi (TI).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka isu-isu strategis yang harus ditangani Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023 secara berkesinambungan untuk mendukung isu strategis daerah yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran aparatur atas pentingnya revolusi mental dan peningkatan pelayanan publik yang profesional melalui pengembangan inovasi teknologi informasi kepegawaian;
2. Peningkatan budaya disiplin, dan taat hukum dikalangan aparatur melalui konsistensi penanganan kasus pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum;
3. Penataan dan optimalisasi kelembagaan instansi pemerintah daerah melalui penempatan pegawai yang profesional dan proporsional, Assesment dan pengembangan kompetensi;
4. Peningkatan kompetensi dan sumberdaya aparatur pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas lebih banyak mengarah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan administrasi Pemerintah, guna meningkatkan Kualitas ASN yang mengarah pada sasaran :

1. Meningkatnya kompetensi ASN.
2. Meningkatnya kualitas kinerja Dan Disiplin ASN

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka menghadapi permasalahan dan isu-isu strategis serta tantangan dan perkembangan perubahan yang akan terjadi sesuai tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas, dalam menyelenggarakan pemerintahan yang mengarah pada manajemen Aparatur Sipil Negara dalam mendukung Kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas untuk mencapai visi pembangunan daerah 2018 – 2023 “Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri” Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas akan mendukung MISI ke 1 yaitu *Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat*;. Mengacu pada visi misi pembangunan Kabupaten Banyumas tersebut di atas maka tujuan yang ingin dicapai Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas adalah Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif dengan sasaran :

- Meningkatnya kompetensi ASN.
- Meningkatnya kualitas kinerja ASN

3.2 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja tahun 2023

A. Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri No 90 Tahun 2019

Program penunjang fungsi Kepegawaian : Program Kepegawaian Daerah

Program penunjang fungsi Pendidikan dan Pelatihan : Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Kegiatan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Mebeulair
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Kepegawaian Daerah

Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

- Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK
- Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Pengelolaan Data Kepegawaian

Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

- Pengelolaan Mutasi ASN
- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
- Pengelolaan Promosi ASN

Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

- Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
- Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Pembinaan Disiplin ASN
- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
- Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Untuk mengetahui rekapitulasi usulan program dan kegiatan serta besaran perkiraan anggaran yang direncanakan tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Sumb er Dana	Unit kerja perang kat daerah Penang- gung- jawab
					2022		2023		Target Akhir Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
TOTAL						92276880706		112,276,880,706		258,527,560,510	PAD	
Terwujudnya SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif			Indeks Profesionalitas ASN.	%	71	92276880706	71	112,276,880,706	71	258,527,560,510	PAD	
	Meningkatnya kualitas kinerja ASN		Persentase ASN yang mendapatkan penilaian kinerja kategori BAIK	%	100	90972572706	100	111,032,507,704	100	254,778,879,510	PAD	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				2537893000		2256346000		7447301500	PAD	

			Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	%	95	2537893000	95	2256346000	95	7447301500	PAD	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				1290329000		1107782000		4003609500	PAD	
			Jumlah ASN yang mengisi formasi jabatan sesuai penetapan formasi menpan RB	Orang	500	1290329000	500	1107782000	1400	4003609500	PAD	
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				0		0		0	PAD	

			jumlah usulan jabatan yang disusun	Usulan	1500	0	1500	0	4400	0	PAD	
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1200000000		1017453000		3767452500	PAD	
			Jumlah formasi yang tersedia	Formasi	500	1200000000	500	1017453000	1500	3767452500	PAD	
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				300000000		300000000		85499000	PAD	
			Jumlah SK pensiun yang diterbitkan	SK	500	300000000	500	300000000	1500	85499000	PAD	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				300000000		300000000		750000000	PAD	
			Jumlah aplikasi kepegawaian yang tersedia	aplikasi	1	300000000	1	300000000	1	750000000	PAD	

		Pengelolaan Data Kepegawaian				30329000		30329000		75658000	PAD	
			Jumlah arsip kepegawaian yang dikelola	Arsip	11000	30329000	11000	30329000	11000	75658000	PAD	
		Mutasi dan Promosi ASN				6900000000		5900000000		18700000000	PAD	
			Jumlah ASN yang dimutasi dan dipromosikan	Orang	500	6900000000	500	5900000000	500	18700000000	PAD	
		Pengelolaan Mutasi ASN				300000000		300000000		900000000	PAD	
			Jumlah SK Mutasi Pegawai yang diterbitkan	SK	200	300000000	200	300000000	600	900000000	PAD	
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1850000000		1850000000		5550000000	PAD	
			Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang diterbitkan	SK	1800	1850000000	1800	1850000000	5400	5550000000	PAD	

		Pengelolaan Promosi ASN				475000000		375000000		1225000000	PAD	
			Jumlah kekosongan JPTP yang terisi	jabatan	7	475000000	4	375000000	14	1225000000	PAD	
		Pengembangan Kompetensi ASN				330000000		330000000		890000000	PAD	
			Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	Orang	400	330000000	400	330000000	1200	890000000	PAD	
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN				300000000		300000000		800000000	PAD	
			Jumlah PNS yang dikirim mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Tugas Belajar, Ijin Belajar, Ijin Penggunaan Gelar)	Orang	300	300000000	400	300000000	900	800000000	PAD	

		Fasilitasi Pengembang an Karir dalam Jabatan Fungsional				30000000		30000000		90000000	PAD	
			Jumlah SK Pejabat Fungsional yang terbit	SK	350	30000000	350	30000000	1050	90000000	PAD	
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				227564000		228564000		683692000	PAD	
			Jumlah ASN yang nilai SKP nya baik	Orang	11000	227564000	11000	228564000	11000	683692000	PAD	
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				600000000		600000000		1800000000	PAD	
			Jumlah ASN yang mengirimkan evaluasi kinerja	Orang	10000	600000000	10000	600000000	30000	1800000000	PAD	

		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				5000000		6000000		16000000	PAD	
			Jumlah dokumen kegiatan evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang disusun	Dokumen	1	5000000	1	6000000	2	16000000	PAD	
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai				10200000		10200000		30600000	PAD	
			Jumlah pegawai yang menerima penghargaan	Orang	150	10200000	150	10200000	450	30600000	PAD	
		Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai				0		0		0	PAD	
			Jumlah ASN yang menerima tanda jasa	Orang	1	0	1	0	2	0	PAD	

		Pembinaan Disiplin ASN				46000000		46000000		138000000	PAD	
			Jumlah kegiatan pembinaan disiplin ASN yang dilaksanakan	Keg	10	46000000	10	46000000	30	138000000	PAD	
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				30364000		30364000		91092000	PAD	
			Jumlah SK Pelanggaran Disiplin ASN yang diterbitkan	SK	10	30364000	10	30364000	30	91092000	PAD	
		Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai				76000000		76000000		228000000	PAD	
			Jumlah SK Izin Perceraian Pegawai yang diterbitkan	SK	40	76000000	40	76000000	120	228000000	PAD	

		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				88434679706		108,776,161,706		247,331,578,010	PAD	
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	60000000	100	135000000	100	225000000	PAD	
		X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				60000000		135000000		225000000	PAD	

[illegible]

		X.XX.01.2.01.0 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
		X.XX.01.2.01.0 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				60000000		75000000		165000000	PAD	
			Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokum en	1	60000000	1	75000000	1	165000000	PAD	
			Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	86710075395	100	106,401,993,395	100	241,963,435,716	PAD	

		X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				86710075395		241,963,435,716		241,963,435,716	PAD	
			Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	2	86710075395	2	241,963,435,716	2	241,963,435,716	PAD	
		X.XX.01.2.02.0 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				86620075395		241,963,435,716		241,963,435,716	PAD	
			Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	433	86620075395	433	241,963,435,716	1299	241,963,435,716	PAD	
		X.XX.01.2.02.0 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				900000000		900000000		296400000	PAD	
			Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	8	900000000	8	900000000	8	296400000	PAD	

			Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	554604311	100	979168311	100	1873870622	PAD	
		X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				224604311		489168311		837920622	PAD	
			Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit	5	224604311	5	489168311	5	837920622	PAD	
		X.XX.01.2.07.0 5 Pengadaan Mebel				29604311		59168311		88772622	PAD	
			Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Unit	5	29604311	5	59168311	10	88772622	PAD	
		X.XX.01.2.07.0 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				120000000		250000000		494148000	PAD	

			Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Jenis	3	120000000	3	250000000	8	494148000	PAD	
		X.XX.01.2.07.1 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75000000		180000000		255000000	PAD	
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	2	75000000	2	180000000	4	255000000	PAD	
		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				330000000		490000000		1035950000	PAD	

			Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	5	330000000	5	490000000	5	1035950000	PAD	
		X.XX.01.2.09.0 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				70000000		100000000		235450000	PAD	
			Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	15	70000000	15	100000000	15	235450000	PAD	
		X.XX.01.2.09.0 5 Pemeliharaan Mebel				20000000		60000000		80000000	PAD	
			Jumlah mebelair yang dipelihara	Unit	25	20000000	50	60000000	100	80000000	PAD	

		X.XX.01.2.09.0 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40000000		100000000		185500000	PAD	
			Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	20	40000000	30	100000000	60	185500000	PAD	
		X.XX.01.2.09.0 9 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				170000000		200000000		445000000	PAD	
			Jumlah Gedung Pembangunan yang dipelihara	Unit	2	170000000	2	200000000	2	445000000	PAD	

		X.XX.01.2.09.1 1 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30000000		30000000		90000000	PAD	
			Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	15	30000000	20	30000000	45	90000000	PAD	
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	1110000000	100	1260000000	100	3269271672	PAD	
		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				605000000		720000000		1767651900	PAD	
			Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	5	605000000	5	720000000	5	1767651900	PAD	

		X.XX.01.2.06.0 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor				30000000		60000000		111496000	PAD	
			Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	5	30000000	5	60000000	5	111496000	PAD	
		X.XX.01.2.06.0 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				75000000		100000000		226000000	PAD	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	5	75000000	5	100000000	5	226000000	PAD	
		X.XX.01.2.06.0 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30000000		75000000		135000000	PAD	

			Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	5	30000000	5	75000000	15	135000000	PAD	
		X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				170000000		170000000		507650000	PAD	
			Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	170000000	12	170000000	12	507650000	PAD	
		X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				50000000		65000000		167460100	PAD	
			Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	12	50000000	12	65000000	12	167460100	PAD	
		X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250000000		250000000		620045800	PAD	

			Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	12	250000000	12	250000000	12	620045800	PAD	
		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				505000000		540000000		1501619772	PAD	
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	3	505000000	3	540000000	3	1501619772	PAD	
		X.XX.01.2.08.0 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200000000		200000000		599373772	PAD	

			Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	200000000	12	200000000	12	599373772	PAD	
		X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				250000000		500000000		750000000	PAD	
			Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	Jenis	2	250000000	2	500000000	2	750000000	PAD	
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2800000000		2900000000		827246000	PAD	
			Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	10	2800000000	10	2900000000	10	827246000	PAD	

	Meningkat nya kompetens i ASN		Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatan nya	%	100	1304308000	100	1244373000	100	3748681000	PAD	
		PROGRAM PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA				1304308000		1244373000		3748681000	PAD	
			Prosentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan kebutuhan	%	0.8	1304308000	0.8	1244373000	2.4	3748681000	PAD	
		Pengembang an Kompetensi Teknis				1000000000		1000000000		2000000000	PAD	
			Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis	Orang	100	1000000000	100	1000000000	100	2000000000	PAD	

		Penyelenggar aan Pengembang an Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggar a Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				100000000		100000000		200000000	PAD	
			Jumlah ASN yang lulus penyelenggara an Diklat Teknis bagi Jabatan Administrasi	Orang	40	100000000	40	100000000	80	200000000	PAD	

		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembang an Kompetensi Manajerial dan Fungsional				1204308000		1144373000		3548681000	PAD	
			Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Manajerial dan Fungsional	Orang	377	1204308000	400	1144373000	837	3548681000	PAD	
		Penyelenggar aan Pengembang an Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpina n, dan Prajabatan				1204308000		1144373000		3548681000	PAD	

			Jumlah ASN yang lulus penyelenggara an Diklat Manajerial dan Fungsional	Orang	377	1204308000	400	1144373000	837	3548681000	PAD	
--	--	--	--	-------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	--

BAB III

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas merupakan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 merupakan penjabaran arah kebijakan pembangunan dibidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan aparatur sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

Agar pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dapat berjalan dengan efektif, maka perlu dikembangkan suatu rencana yang menyeluruh, terjadwal dan transparan serta didukung dengan kemampuan keuangan daerah yang memadai. Peran masyarakat atau stakeholder yang lain adalah sangat kami butuhkan sebagai fungsi kontrol yang positif bagi perencanaan kinerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas untuk Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara sesuai dengan yang diharapkan.

Purwokerto, Agustus 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS



Ir. DOKO WIKANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630408 198810 1 002